BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Dalam era globalisasi dan persaingan pasar bebas, negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala keperluannya. Salah satu sumber keuangan negara yang potensial adalah pajak. Karena itu untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peranan aktif para warga negara untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak. Sebagai salah satu penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif lebih stabil, dari sektor tersebut diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai rumah tangga negara dapat diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang paling penting bagi negara dan sangat diharapkan oleh negara untuk membiayai belanja negara.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, di mana daerah mempunyai kesiapan dan kekuasaan yang berbeda-beda dalam Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya. Daerah berhak mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu harus merasionalisasikan pengeluaran dan penerimaan daerah serta manajemen keuangan diseluruh jajaran birokrasi.

Dalam melaksanakan otonomi daerah dimana titik berat diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, maka diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah ini diperlukan agar dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri.

Berkaitan dengan dimensi otonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonomi mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999.

Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah, dimana diharapkan mampu membiayai urusan rumah tangganya sendiri akan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dituntut agar dapat mengatur keuangan daerahnya dan mencari sumber-sumber potensi bagi pendapatan daerah. Penggalian dan pemberdayaan sumber-sumber pendapatan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Tugas pokok dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat adalah melaksanakan kegiatan pemungutan, pengumpulan, dan pemasukan pendapatan daerah ke kas daerah secara maksimum terhadap sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh walikota atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Bandung Barat sebagaimana diatur dalam keputusan menteri dalam negeri No. 23 tanggal 29 Mei tahun 1989 adalah berkedudukan sebagaimana unsur pelaksanaan pemerintah kabupaten Bandung Barat di bidang pendapatan daerah. Tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pendapatan, sedangkan fungsi badan adalah untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar adalah pajak daerah. Ada beberapa jenis pajak daerah yang dipungut oleh DPPKAD Kabupaten Bandung Barat, salah satunya adalah Pajak Restoran yang ikut berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak restoran, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bandung Barat menyusun sebuah anggaran pendapatan. Dari beberapa jenis anggaran pendapatan salah satunya adalah anggaran pendapatan dari pajak restoran. Anggaran yang berupa target yang harus dicapai, diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten Bandung Barat dari sektor pajak, khususnya pajak restoran.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam laporan ini tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai anggaran terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung Barat. Maka penulis mengambil Judul **“Prosedur Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat“.**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud

Pelaksanaan kerja praktek ini untuk mengetahui anggaran pajak restoran pada DPPKAD Kabupaten Bandung Barat. Secara garis besar agar penulis mengetahui aplikasi penulis di lingkungan kerja khususnya di DPPKAD.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur realisasi anggaran pendapatan pajak restoran
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan anggaran pendapatan pajak restoran, Pengelolaan Keuangan Dan pada Dinas Pendapatan Aset Daerah.
3. Untuk mengetahui bagaimana target realisasi pendapatan pajak restoran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat .

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat mengetahui anggaran pendapatan terhadap penerimaan pajak restoran dan prosedur penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat

2. Bagi Perusahaan

Dengan adanya laporan kerja praktek ini diharapkan dapat berguna bagi bahan pertimbangan serta informasi mengenai anggaran pendapatan pajak restoran terhadap efektivitas pencapaian pendapatan pajak restoran.

3. Bagi Universitas

Untuk memberikan sumbangan wawasan dan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya mengenai prosedur pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam melakukan kerja praktek ini penulis menggunakan metode pengamatan lansung (*Observation*) atau penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung dan turun langsung pada obyek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan cara :

1. **Wawancara (*Interview)***, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan bagian anggaran dan bagian akuntansi serta staf lainnya yang bisa memberikan keterangan yang dibutuhkan.
2. **Pengamatan langsung (*Observation)***, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada perusahaan.
3. **Dokumentasi**, yaitu mengumpulkan data dan menganalisa data-data tentang perusahaan, terutama yang berhubungan dengan anggaran pendapatan pajak restoran dan realisasi pendapatan pajak restoran.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Kerja Praktek dilakukan di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat (DPPKAD KBB) yang berlokasi Jl.Raya Batujajar KM. 3,5 No.46 Batujajar. Mulai dari tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 , kegiatan kerja praktek dimulai pukul 08.00-16.30 WIB hari Senin s.d Jumat.